

Judul : Penilaian Komisi VI, Pertamina mampu tahan harga BBM
Tanggal : Rabu, 08 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Penilaian Komisi VI Pertamina Mampu Tahan Harga BBM



FOTO: DPR GO.ID

Christiany Eugenia

KOMISI VI DPR menilai PT Pertamina masih mampu menjalankan kebijakan Pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Perusahaan pelat merah itu juga dinilai masih dapat mengelola keuangan dengan baik kendati harus menanggung selisih harga BBM.

Anggota Komisi VI DPR Christiany Eugenia Paruntu mengatakan, saat ini Pertamina masih cukup kuat menjalankan kebijakan Pemerintah tersebut. Hal ini didukung oleh skema kompensasi dari Pemerintah yang terus berjalan dan likuiditas perusahaan yang memadai.

"Berdasarkan keterangan Pemerintah, kompensasi kepada Pertamina dibayarkan secara rutin dengan porsi sekitar 70 persen setiap bulan," ujar Christiany di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, mekanisme ini menjadi faktor penting dalam menjaga arus kas perusahaan tetap sehat. Sehingga, beban selisih harga yang ditanggung tidak mengganggu operasional maupun kinerja keuangan secara signifikan.

Kondisi fundamental Pertamina yang kuat dari sisi aset maupun pendapatan ini turut menjadi penopang dalam menghadapi fluktuasi harga

energi global. Dalam jangka pendek, peran Pertamina sebagai penyangga masih efektif untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri tanpa menimbulkan tekanan berlebih.

Namun demikian, Christiany mengingatkan, kondisi aman ini bersifat situasional dan bergantung pada berbagai faktor. Antara lain; tren harga minyak dunia dan konsistensi pembayaran kompensasi dari Pemerintah. Karena itu, pengawasan dan evaluasi kebijakan tetap perlu dilakukan secara berkala agar tidak menimbulkan risiko di masa mendatang.

Dia menekankan, selama dukungan Pemerintah melalui kompensasi berjalan baik dan kondisi keuangan perusahaan tetap kuat, Pertamina masih mampu menjalankan penguasaan ini. "Tapi, pengawasan harus tetap diperketat agar stabilitas ini bisa terus terjaga," tegas politikus Golkar ini.

Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim menambahkan, kebijakan menahan harga BBM subsidi maupun non subsidi jangan sampai mengorbankan kesehatan finansial PT Pertamina. Untuk menanggung seluruh beban selisih harga, perusahaan pelat merah tersebut dalam posisi sulit dan menantang.

Rivqy menyarankan adanya kejelasan mengenai skema kompensasi agar beban tersebut tidak mengganggu operasional Pertamina dalam jangka panjang. Ketidakjelasan perhitungan kompensasi dinilai dapat berdampak sistemik pada sektor energi nasional secara keseluruhan.

"Kebijakan Pemerintah menahan harga BBM di tengah gejolak harga mentah dunia menempatkan PT Pertamina dalam posisi yang cukup menantang secara finansial," ujar Rivqy di Jakarta, Senin (6/5/2026). ■ TIF